

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Ida Ayu Nilam Ulandari¹
Ida Bagus Putu Purbadharmaja²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
¹e-mail: nilamulandari99@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi non partisipan. Sumber data penelitian bersumber dari data sekunder. Pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : (1) Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif signifikan secara langsung terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Bali. Kontribusi anggaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Bali (2) Kemudian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan di Provinsi Bali dan Kemandirian Keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan. (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan melalui kemandirian Keuangan di Provinsi Bali. Kontribusi anggaran Pemerintah tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan melalui kemandirian keuangan di provinsi Bali.

Kata kunci: tingkat partisipasi angkatan kerja, kontribusi anggaran pemerintah, kemandirian keuangan dan kesejahteraan

ABSTRACT

This research was conducted in Bali Province. Data collection method used in this study is non-participant observation. The source of research data comes from secondary data. This data collection was carried out through the observation of the Bali Provincial Statistics Agency. The conclusions of this study are as follows: (1) The level of labor force participation has a significant negative direct effect on financial independence in the Province of Bali. The contribution of the government budget has a direct positive and significant effect on financial independence in the Province of Bali (2) Then the Labor Force Participation Level has a direct and significant negative effect on welfare in the Province of Bali. The contribution of the Government Budget has no effect on welfare in the Province of Bali and Financial Independence has a direct positive and significant effect on welfare. (3) The level of labor force participation does not directly affect welfare through financial independence in Bali Province. The contribution of the Government's budget does not directly affect welfare through financial independence in the province of Bali.

Keywords: labor force participation rate, contribution of government budget, financial independence and welfare

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah (Davoodi, 1998). Argument ekonomi dasar yang mendukung desentralisasi fiskal berdasarkan dua asumsi yang saling melengkapi yaitu desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah diposisikan lebih baik daripada pemerintah pusat dalam penyediaan pelayanan publik sebagai hasil keuntungan informasi dan mobalitas penduduk serta persaingan antara pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik akan menjamin kecocokan prefensi masyarakat dan pemerintah daerah. (Suci dan Asmara, 2014). Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal menurut Iqram (2013:153-154) terkandung tiga misi utama, yaitu terdiri dari meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menurut Hasana (2009) dan Olivia (2012) desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya (Nyoman Suartha, 2017).

Menurut Katy dan Anas (2013) dan Kurniawan dan Managi (2012) desentralisasi telah mampu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat seperti pembangunan sarana umum, selain itu dengan pengalokasian yang tepat pada belanja pemerintah maka diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat (Kusuma, 2016). Menurut Moisiu (2014) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*taxing power*). Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemampuan mengenali potensi daerah yang beragam ini tidak dapat ditangani sendiri oleh salah satu pihak saja (pemerintah pusat) (Hutajulu dkk, 2012). Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam peyelenggaraan otonomi daerah (Feltensein dan Iwata, 2005).

Kewenangan fiskal pemerintah daerah inilah yang menjadikan daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya (Fajrii dkk, 2016). Hal ini memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang merupakan kekayaan daerah miliknya menjadi semakin lebar. Silver *et al.* (2010) menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara

demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kewajiban tersebut dapat terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya keuangan secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Keberhasilan pengelolaan potensi daerah tersebut dapat diukur dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Darmanto (2012) menyatakan bahwa salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mencapai pemerintahan yang baik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan sektor publik menjalankan tugasnya dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berakibat pada peningkatan jumlah kerja (Dong, 2016). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu

indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei (Armidi dkk, 2018). Peningkatan partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat dan selanjutnya pendapatan per kapita masyarakat menjadi meningkat. (Dong, 2016). Di samping itu, perubahan struktur penyerapan tenaga kerja dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Hukom, 2014). Suatu perekonomian yang berkembang dengan pesat belum tentu jaminan yang paling baik terhadap ciri suatu daerah itu makmur bila tidak diikuti perluasan kesempatan kerja guna menampung tenaga-tenaga kerja baru yang setiap tahun memasuki angkatan kerja, dengan demikian antara pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional berkaitan erat dengan perluasan kesempatan kerja karena faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor yang penting artinya bagi pertumbuhan ekonomi (Fozzard, 2001). Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja agar angkatan kerja yang ada dapat diserap. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dan merangsang pertumbuhan ekonomi artinya semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik, dengan catatan mereka mempunyai daya beli, sehingga permintaan akan meningkat (Menajang, 2014).

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan dan kesejahteraan daerah di Provinsi Bali yaitu, tingkat partisipasi angkatan kerja yang sampai saat ini jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bali masih sangat

tinggi terutama pada daerah yang jumlah penduduknya tinggi dengan SDM yang rendah sehingga susah untuk mencari pekerjaan dan menjadi pengangguran yang membuat mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut rendah. Dimana hal ini dapat berpengaruh terhadap kurang berkembangnya kemandirian keuangan pada daerah tersebut yang disebabkan oleh sedikitnya pajak penghasilan (PPh) yang diterima oleh daerah (Ardika, 2017).

Faktor yang kedua yaitu kontribusi anggaran pemerintah yang dilihat dari peran pemerintah disini tidak bisa lepas kaitannya dengan kesejahteraan rakyatnya baik itu peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Lucky dan Jones, 2003). Kusreni dan Suhab (2009) menekankan pentingnya peran pemerintah melalui kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan pada sisi penawaran. Model ini menyatakan *output* per kapita dipengaruhi oleh modal per pekerja dan *input* dari investasi pemerintah (*government expenditure*). Seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Halim, 2014 : 229). Ditetapkan juga Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua

Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Yuliandriansyah, 2009).

Berlakunya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya pemerintah belum bisa menjalankan amanat tersebut dengan sempurna dikarenakan adanya hambatan seperti banyak daerah yang belum mampu menyusun laporan keuangan antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, sistem akuntansi yang belum didasarkan pada Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah dan kebijakan akuntansi yang belum dilandasi oleh Peraturan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan juga terbatasnya pemahaman aparat terhadap laporan keuangan (Susantih dan Saftiana, 2010:4).

Permasalahan yang ada pada kemandirian keuangan di Provinsi Bali yang masih ketergantungan dengan pemerintah pusat dikarenakan beberapa faktor yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat terhadap pemerintah daerah agar pengelolaan potensi yang ada pada suatu daerah dapat dimaksimalkan seperti kekayaan alam, pajak, dan lain-lain sehingga daerah dapat terus berkembang sehingga keuangan daerah terus meningkat sehingga akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sumber daya lokal yang perlu ditingkatkan lagi, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tumbuh tiap tahunnya dengan pembekalan pendidikan, dan keterampilan melalui pelatihan sehingga mampu bersaing dipasar kerja. Angkatan kerja yang besar dan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk mengakomodasi dan mengurangi tingkat pengangguran dengan berbagai kebijakan daerah (Irhamni, 2018). Rimbawan (2010) menyebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan adalah menciptakan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya agar angkatan kerja dapat terserap dalam kegiatan ekonomi. Dengan perkataan lain proses pembangunan harus dapat menekan angka pengangguran. Terlibatnya angkatan kerja dalam berbagai kegiatan ekonomi berimplikasi luas terhadap aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Hal ini mudah dipahami, karena makin banyak angkatan kerja yang bekerja berimplikasi pada meningkatnya daya beli masyarakat yang kemudian mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produksi atau membuka usaha baru sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mendorong produk domestik regional bruto (PDRB) dan ekonomi daerah.

Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat daya dan pola partisipan angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk (Mohtar,

2017). Modal pembangunan yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah selain dari keuangan daerah adalah sumber daya manusia. partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang bisa dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Wiratno, 2008: 8). Menurut ekonom Klasik (Smith), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

Penelitian Muda and Hutapea (2018) menyatakan bahwa terhadap keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Hasil penelitian Haile and Zarazua (2018) menemukan bahwa belanja sosial pemerintah telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan agregat di negara berkembang. Pada studi yang dilakukan oleh Mahi and Nazara (2012) menemukan bukti empiris bawasanya dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Taras dan Artini (2017) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah daerah. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, salah satu faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan

indikator yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut ialah rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD (Kuncoro, 2005: 8)

Pengaruh kemandirian keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pendapatan yang dikemukakan oleh Sumanto and Effendie (2015), yang menyatakan bahwa peningkatan belanja daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena peningkatan belanja daerah akan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi di daerah yang selanjutnya akan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Kesejahteraan masyarakat tidak dapat terlepas dari pentingnya peran pemerintah tanpa adanya campur tangan pemerintah, daerah tidak akan dapat berkembang seperti salah satu program pemerintah yaitu melalui salah satu program pemerintah yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Pedesaan) yang memberikan pelayanan seperti membangun sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, dan dalam layanan kesehatan. Seperti contoh program PNPM yang berada di kabupaten Buleleng tahun 2010 memiliki angka kemiskinan yang paling tinggi di Provinsi Bali yaitu sebesar 45900 jiwa (BPS,2017) kabupaten Buleleng yang notabena bekerja keras dalam hal mengentaskan kemiskinan sudah menunjukkan hasil kerja yang sangat memuaskan (Andi, 2012). Dari sekian kecamatan yang ada pada Kabupaten Buleleng, kecamatan Gerokgak telah melaksanakan PNPM Mandiri Pedesaan yang paling lancar dan partisipasi

masyarakatnya cukup tinggi (Andi, 2012) partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi (Anwar dan Rida, 2009).

2.1.7 Hubungan Mandiri Keuangan terhadap Kesejahteraan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat dengan arah hubungan positif. Hubungan yang positif berarti bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyat. Ini berarti bahwa dengan semakin tinggi rasio PAD terhadap total penerimaan Dana Perimbangan maka kondisi ini akan semakin mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat. Sumanto and Effendie (2015), yang menyatakan bahwa peningkatan belanja daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena peningkatan belanja daerah akan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi di daerah yang selanjutnya akan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Tentu hal ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pencapaian PAD agar dapat terus meningkat, mengingat pengaruhnya yang positif dan signifikan terhadap bagi pencapaian kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan daerah.

2.1.8 Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Kesejahteraan melalui Kemandirian Keuangan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mempunyai hubungan yang erat terhadap kesejahteraan karena Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh penting terhadap

tingkat pendapatan daerah tersebut. Semakin banyak jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di suatu daerah tersebut maka tentu pendapatan asli daerah melalui Pajak Penghasilan (PPh) ikut meningkat. Seperti contohnya misalnya di daerah pedesaan seperti Kabupaten Bangli dan Klungkung yang masih banyak jumlah penduduknya yang menganggur sehingga kurangnya pajak penghasilan yang diterima pemerintah daerah yang mengakibatkan kurangnya kesejahteraan daerah tersebut dibandingkan Kabupaten Badung yang Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang besar dapat mengakibatkan pajak penghasilan yang diterima daerah besar sehingga akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (Blane, 2003).

2.1.9 Hubungan Kontribusi Anggaran Pemerintah terhadap Kesejahteraan melalui Kemandirian Keuangan

Kontribusi anggaran pemerintah yang dilihat dari peran pemerintah disini tidak bisa lepas kaitannya dengan kesejahteraan rakyatnya baik itu peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan (Halim, 2014 : 229). Ditetapkan juga Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua

Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Yuliandriansyah, 2009).

Kontribusi anggaran pemerintah yang dilihat dari peran pemerintah terhadap kesejahteraan suatu daerah melalui kemandirian keuangan dapat dilihat dari keikutsertaan pemerintah dalam membantu pengelolaan daerah melalui bantuan dana transfer yang berupa dana perimbangan yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Untuk melakukan analisis kemandirian keuangan daerah provinsi Bali pada era otonomi daerah periode 2011-2015, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1: Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kontribusi Anggaran Pemerintah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan.
- H2: Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kontribusi Anggaran Pemerintah, dan Kemandirian Keuangan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di Provinsi Bali. Sampel yang digunakan selama 5 tahun dari tahun 2011-2015 dengan data sekunder (*time series*). Lokasi penelitian ini adalah seluruh wilayah Provinsi Bali dengan menggunakan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Obyek dari penelitian ini dibatasi pada beberapa variabel saja walaupun dapat diduga bahwa masih banyak variabel lain yang dapat terkait dengan kemandirian keuangan dan kesejahteraan daerah. Objek penelitian ini adalah Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan dan Kesejahteraan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi: 1) Variabel Terikat (*Dependent Variable*), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel yang mengalami perubahan akibat pengaruh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kesejahteraan (Y_2). 2) Variabel Bebas (*Independent Variable*), yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (X_1) dan Kontribusi Anggaran Pemerintah (X_2). 3) Variabel Intervening, yaitu variabel yang memiliki peran sebagai mediasi, dimana variabel ini bisa menjadi variabel terikat dan variabel bebas. Variabel intervening dalam penelitian ini yaitu Kemandirian Keuangan (Y_1).

Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu analisis jalur (*path analysis*) dengan menguji pengaruh langsung dan tidak langsung masing-masing variabel terhadap variabel terikat disertai dengan Uji Sobel. Analisis jalur dipergunakan karena di dalam penelitian ini dirancang untuk menafsir hubungan kualitas pada variabel yang berjenjang terhadap teori. Di dalam penelitian ini terdapat 2 variabel terikat, 1 variabel intervening dan 2 variabel bebas.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*). Menurut Ghozali (2013:249) analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (Sugiyono, 2013:297). Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen dan hubungan yang tidak langsung melalui variabel intervening.

Keterangan

Y_1 : Mandiri Keuangan

Y_2 : Kesejahteraan

X_1 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

X_2 : Kontribusi Anggaran Pemerintah

e_1, e_2 : Error term, nilai kesalahan observasi diasumsikan nol

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 : Koefisien Regresi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian persamaan I dilakukan untuk melihat tingkat partisipasi angkatan kerja, kontribusi anggaran pemerintah dan kesejahteraan terhadap kemandirian keuangan secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan program *SPSS* maka hasil uji regresi disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X₁), Kontribusi Anggaran Pemerintah (X₂), Terhadap Kemandirian Keuangan (Y₁) secara parsial

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	165.735	40.825		4.060	.000
Tingkat partisipasi angkatan kerja	-2.035	.533	-.478	-3.819	.000
Kontribusi anggaran pemerintah	.213	.069	.387	3.092	.004
F Hitung					11,167
Signifikansi					0,000
R ₁					0,589
R ₁ Square					0,347

Sumber: Data diolah, 2017

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis pengaruh Tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap Kemandirian keuangan diperoleh nilai Sig. t sebesar 0,000 dengan nilai koefisien beta-0,478. Nilai Sig. t $0,000 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan.

Tabel 1 juga menunjukkan hasil analisis pengaruh Kontribusi anggaran pemerintah terhadap Kemandirian keuangan diperoleh nilai Sig. t sebesar 0,004 dengan nilai koefisien beta 0,387. Nilai Sig. t $0,004 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H₀ ditolak dan H₂ diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa Kontribusi anggaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian keuangan

Pengujian persamaan II dilakukan untuk melihat tingkat partisipasi angkatan kerja, kontribusi anggaran pemerintah dan kemandirian keuangan terhadap kesejahteraan secara langsung yang dilakukan dengan menggunakan program *SPPS* maka hasil uji regresi disajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_1), Kontribusi Anggaran Pemerintah (X_2), dan Kemandirian Keuangan (Y_1) terhadap Kesejahteraan (Y_2).

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	82.049	2.395		34.254	.000
Tingkat partisipasi angkatan kerja	-.152	.031	-.423	-4.957	.000
Kontribusi anggaran pemerintah	-.003	.004	-.064	-.784	.437
Kemandirian keuangan	.053	.008	.621	6.850	.000
F Hitung					48,437
Signifikansi					0,000
R₂					0,883
R₂ Square					0,780

Sumber: *Lampiran 2, 2018 (Data Diolah)*

Tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki nilai sig. $0.000 < 0.05$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar $-0,152$ yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Kontribusi anggaran pemerintah memiliki nilai sig. $0.437 > 0,05$ dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar $-0,003$, yang menunjukkan bahwa kontribusi anggaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan. Kemandirian keuangan memiliki nilai Sig. t $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi positif sebesar $0,053$. Hasil ini mempunyai arti bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan-hubungan antar variabel penelitian yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Koefisien jalur

dapat dibuat dalam bentuk diagram jalur (Suyana, 2012:156). Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam persamaan struktural, yaitu:

Persamaan Struktural 1

$$Y_1 = -0,478 X_1 + 0,387 X_2 + e_1$$

Persamaan Struktural 2

$$Y_2 = -0,423X_1 - 0,064X_2 + 0,621 Y_1 + e_2$$

Untuk mengetahui nilai e_1 yang menunjukkan jumlah *variance* variabel kemandirian keuangan yang tidak dijelaskan oleh variabel tingkat partisipasi angkatan kerja dan kontribusi anggaran pemerintah dihitung menggunakan rumus.

$$Pe_1 = \sqrt{1 - R_1^2}$$

Substruktur 1:

$$Y_1 = -0,478 X_1 + 0,387 X_2 + e_1$$

$$\text{Pengaruh error } (Pe_1) = \sqrt{1 - R_1^2}$$

$$Pe_1 = \sqrt{1 - 0,347} = \sqrt{0,653} = 0,808$$

Sedangkan untuk mengetahui nilai e_2 yang menunjukkan *variance* variabel kesejahteraan yang tidak dijelaskan oleh variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, kontribusi anggaran pemerintah, dan kemandirian keuangan maka dihitung menggunakan rumus.

$$Y_2 = -0,423 X_1 - 0,064 X_2 + 0,621 Y_1 + e_2$$

$$\text{Pengaruh error } (Pe_2) = \sqrt{1 - R_2^2}$$

$$Pe_2 = \sqrt{1 - 0,780} = \sqrt{0,220} = 0,469$$

Berdasarkan perhitungan pengaruh error (Pe_i), didapatkan hasil pengaruh error (Pe_1) sebesar 0,808 dan pengaruh error (Pe_2) sebesar 0,469. Hasil koefisien determinasi total adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (Pe_1)^2 (Pe_2)^2 \\ &= 1 - (0,808)^2 (0,469)^2 \\ &= 1 - (0,653) (0,220) \\ &= 1 - 0,1436 = 0,8564 \end{aligned}$$

Nilai determinasi total sebesar 0,8564 mempunyai arti bahwa sebesar 85,64% variasi kesejahteraan dipengaruhi oleh variasi tingkat partisipasi angkatan kerja, kontribusi anggaran pemerintah dan kemandirian keuangan, sedangkan sisanya sebesar 14,36% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka nilai z dari koefisien ab dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Sb_1b_5 = \sqrt{(0,621)^2 (0,533)^2 + (-0,478)^2 (0,008)^2 + (0,533)^2 (0,008)^2}$$

$$Sb_1b_5 = 0,33104$$

Keterangan :

Sb_1 = standar error koefisien regresi variabel X_1 terhadap Y_1

Sb_5 = standar error koefisien regresi variabel Y_1 terhadap Y_2

$$Z = \frac{b_1b_5}{Sb_1b_5}$$

$$Z = \frac{(-0,478)(0,621)}{0,33104}$$

$$Z = -0,8967$$

$$\text{Sig} = (1 - \text{NORMDIST}(-0,8967)) + 2))$$

$$\text{Sig} = 1,6301$$

Keterangan :

b_1 = koefisien pengaruh variabel X_1 terhadap Y_1

b_7 = koefisien pengaruh variabel Y_1 terhadap Y_2

Berdasarkan hasil Uji Sobel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien $Z = -0,8967 < 1,96$ dengan tingkat signifikansi $1,6301 > 0,05$ yang berarti variabel mediator yakni kemandirian keuangan dinilai secara signifikansi memediasi hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kesejahteraan.

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka nilai z dari koefisien ab dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Sb_2b_5 = \sqrt{(0,621)^2 (0,069)^2 + (0,387)^2 (0,008)^2 + (0,069)^2 (0,008)^2}$$

$$Sb_2b_5 = 0,042964$$

Keterangan :

Sb_2 = standar error koefisien regresi variabel X_1 terhadap Y_1

Sb_5 = standar error koefisien regresi variabel Y_1 terhadap Y_2

$$Z = \frac{b_1 b_5}{Sb_1 b_5}$$

$$Z = \frac{(0,387)(0,621)}{0,042964}$$

$$Z = 5,5937$$

$$\text{Sig} = (1 - \text{NORMDIST}(5,5937)) + 2))$$

$$\text{Sig} = 0,000$$

Keterangan :

b_1 = koefisien pengaruh variabel X_1 terhadap Y_1

b_7 = koefisien pengaruh variabel Y_1 terhadap Y_2

Berdasarkan hasil Uji Sobel diatas menunjukkan bahwa hasil tabulasi $Z = 5,5937 > 1,96$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang berarti variabel mediator yakni kemandirian keuangan dinilai secara signifikan dapat memediasi hubungan antara kontribusi anggaran pemerintah terhadap kesejahteraan.

Hasil analisis menunjukkan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap variabel kemandirian keuangan memiliki hasil t_{test} negatif yakni sebesar $-3,819 < 1,671$ (t_{tabel}) maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Bali.

Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan dikarenakan beberapa faktor seperti banyaknya jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja yang bekerja pada perusahaan informal atau ilegal sehingga untuk pengambilan pajak menjadi terganggu dan akan menyebabkan kurangnya kemandirian keuangan dan juga SDM yang rendah yang akan mengakibatkan penghasilannya kurang yang berdampak pada turunnya tingkat kemandirian keuangan. Dari beberapa hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya *flypaper effect* pada pemerintah daerah tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Becker dan Mulligan (2003) dan Volden (2007) telah mengembangkan model ekonomi politik yang menunjukkan *flypaper effect* terjadi karena pemerintah penerima bergantung pada

pajak distorsi untuk membiayai sebagian dari pengeluaran mereka sehingga ketergantungan pemerintah tersebut akan mengganggu kemandirian keuangan.

Hasil analisis menunjukkan variabel kontribusi anggaran pemerintah terhadap variabel kemandirian keuangan memiliki hasil t_{test} sebesar $3,092 > 1,671$ (t_{tabel}) maka H_2 diterima dan sebaliknya H_0 ditolak. Dengan demikian kontribusi anggaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Bali.

Menurut Swandewi (2014) keberadaan tambahan anggaran pemerintah tentu akan meningkatkan PAD sehingga meningkatkan perhitungan rasio yang menjadi indikator kemandirian keuangan. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Yuliyanto (2018) juga menemukan kontribusi anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan di Provinsi Jawa Timur periode 2014-2016. Penelitian tersebut mengemukakan kemandirian dalam APBD terkait dengan pendapatan asli daerah, sebab semakin besar anggaran dari potensi daerah, bukan dari bantuan pemerintah pusat atau provinsi, maka daerah dapat dikatakan mandiri secara keuangan dan daerah tersebut semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Hasil analisis menunjukkan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap variabel kesejahteraan memiliki hasil t_{test} sebesar $-4,957 < 1,671$ (t_{tabel}) maka H_3 diterima dan sebaliknya H_0 ditolak. Dengan demikian tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan di Provinsi Bali.

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah sebuah rasio pengukuran angkatan kerja terhadap penduduk yang berada pada usia kerja (Susanti, Ikhsan dan Widyanti, 2000). Rasio partisipasi kerja merupakan indikator yang penting untuk menganalisis perkembangan kesejahteraan daerah (Kodrat, 2006). Ukuran tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi begitu kuat oleh faktor-faktor demografi seperti umur, jenis kelamin dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pengaruh negatif dan signifikan dari variabel partisipasi angkatan kerja terhadap kesejahteraan bisa dijelaskan dengan memperhatikan jenis kelamin. Argumen yang dapat dikemukakan adalah jika partisipasi angkatan kerja wanita yang meningkatkan rasio yang terjadi di masyarakat, karena kurangnya kesejahteraan rumah tangga-rumah tangga yang ada di suatu daerah, sehingga wanita harus ikut turun tangan dan mencari pekerjaan.

Hal ini seolah memperlihatkan meningkatnya tenaga kerja malah menurunkan kesejahteraan. Tenaga kerja merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan informasi penting dalam menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan dan pembangunan sumber daya manusia dan lapangan kerja dimasa yang akan datang. Arah pembangunan jangka panjang di prioritaskan pada pengembangan sumber daya manusia yang tangguh, namun bila dikaji dari sektor kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, kependudukan, lingkungan, agama, kebudayaan dan lain-lain tampaknya masih sangat memprihatinkan. Bahkan program pendidikan masih berkuat pada pendidikan dasar dan program wajib belajar.

Hasil analisis menunjukkan Kontribusi anggaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan karena diperoleh hasil t_{test} sebesar $-0,784 < 1,671$ (t_{tabel}) maka H_4 ditolak dan sebaliknya H_0 diterima. Dengan demikian kontribusi anggaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan di Provinsi Bali.

Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Azwar dan Subekan (2014) di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan menggunakan panel regression, random effect model. Penelitian tersebut mengemukakan lebih jelas bahwa efektivitas anggaran tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Pada saat ini tingkat kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya sudah baik, dengan masyarakat yang memiliki SDM yang cukup untuk bekerja disegala bidang yang dikuasainya sehingga mendapatkan tingkat pendapatan yang cukup untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan perekonomiannya dan agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan hidupnya. Sehingga masyarakat tidak mengandalkan bantuan kontribusi anggaran dari pemerintah.

Hasil analisis menunjukkan variabel kemandirian keuangan terhadap variabel kesejahteraan memiliki t_{test} sebesar $6,850 > 1,671$ (t_{tabel}) maka H_5 diterima dan sebaliknya H_0 ditolak. Dengan demikian kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan di Provinsi Bali.

Azwar dan Subekan (2014) juga menemukan hasil yang selaras di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan menggunakan *panel regression, random effect* model. Penelitian tersebut menemukan lebih jelas bahwa kemandirian

berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan arah yang positif. Hasil analisis ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Swandewi (2014) di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Peningkatan pendapatan daerah berarti juga meningkatkan anggaran belanja daerah. Peningkatan belanja daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena peningkatan belanja daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena peningkatan belanja daerah akan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi di daerah yang selanjutnya akan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut (Sumanto and Effendie, 2015).

Semakin tinggi tingkat efektifitas keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rakyat. Ini berarti bahwa dengan semakin tinggi rasio realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan (transfer), dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap target pendapatan daerah maka kondisi ini akan semakin mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat.

SIMPULAN DAN SARAN

Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif signifikan secara langsung terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Bali dikarenakan beberapa faktor seperti banyaknya jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja yang bekerja pada perusahaan informal atau ilegal sehingga untuk pengambilan pajak menjadi terganggu

dan akan menyebabkan kurangnya kemandirian keuangan dan juga SDM yang rendah yang akan mengakibatkan penghasilannya kurang yang berdampak pada turunnya tingkat kemandirian keuangan. Kontribusi anggaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Bali, kontribusi anggaran pemerintah daerah dapat mendorong pembangunan ekonomi sehingga mampu mendorong sektor riil, jika sektor riil di setiap daerah mampu terdongkrak maka akan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Kemudian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan di Provinsi Bali, tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi begitu kuat oleh faktor-faktor demografi seperti umur, jenis kelamin dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pengaruh negatif dan signifikan dari variabel partisipasi angkatan kerja terhadap kesejahteraan bisa dijelaskan dengan memperhatikan jenis kelamin. Kontribusi Anggaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan di Provinsi Bali dan Kemandirian Keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan melalui kemandirian Keuangan di Provinsi Bali. Kontribusi anggaran Pemerintah tidak berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan melalui kemandirian keuangan di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis dari simpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diajukan saran bahwa pemerintah sebaiknya lebih aktif untuk memperbanyak program-program yang membantu meningkatkan masyarakat pada suatu daerah tersebut dalam

berbagai bidang seperti program pendidikan, program peningkatan UMKM tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka tingkat kesempatan kerja juga harus diperluas. Perluasan tingkat kesempatan kerja akan terlaksana jika lapangan pekerjaan tersedia. Diskriminasi instansi perusahaan/pemerintahan dalam merekrut pegawai atau karyawan hendaknya dihilangkan, perekrutan yang benar-benar berdasarkan atas kemampuan bukan atas dasar kekerabatan, ras, suku, agama dan lainnya. Sehingga Pemerintah sebaiknya meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan yang berbasis dengan potensi-potensi yang dimiliki masing-masing wilayah (Crisna dan Sudibya, 2017).

Pemerintah lebih meningkatkan kontribusinya yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yaitu dapat mendorong sektor riil pada Kabupaten/Kota yang akan mendongkrak pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah agar sektor riil tersebut dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.

REFERENSI

- Anak Agung Istri Agung Swandewi. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali . *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 3(7): 356-376.
- Ardika, I Wayan dan Gede Sujana Budhiasa. 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. *Jurnal Piramida*.13(2): 87-96.
- Armidi, Erfit dan Yulmardi. 2018. Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks harga konsumen terhadap upah minimum Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*. 7(1): 33-42

- Azwar, dan Achmad Subekan. 2014. Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Rakyat di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012). MPRA Paper No. 77677.
- Blane D. Lewis. 2003. Tax And Charge Creation By Regional Governments Under Fiscal Decentralisation: Estimates And Explanations. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*. 39(2): 177-192.
- Crisna, Wijaya Gede dan I Ketut Sudibia. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Program Lembaga Distribusi Panganmasyarakat (LDPM) Pada Gapoktan Di Kabupaten Tabanan (Studi Gapoktan Aseman III Di Desa Megati). *Jurnal Piramida*. 12(6): 90-100.
- Davoodi, H dan Zou H. 1998. Fiscal decentralization and economic growth: a cross country study. *Journal of Urban Economics*. Vol. 43, No. 2, pp. 244-245
- Dong, Sarah Xue. 2016. Consistency between Sakernas and the IFLS for Analyses of Indonesia's Labour Market : A Cross-Validation Exercise. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 52(3):343-378
- Fajrii, Arman Delis, Yohanes Vyn Amzar. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatra. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 9(2): 99-107.
- Feltensein, Andrew and Shigeru Iwata. 2005. Decentralization and Macroeconomic Perfomance in China: Regional Autonomy Has Its Costs. *Rusian Journal of Economic*, Vol 76, No.2. pp. 481-501.
- Fozzard, Adrian. 2001. The Busic Budgeting Problem: Approaches to Resources Alocationin The Public Sector and Their Implication for Pro-Poor Budgeting. Center for Aid and Public Expendeture, Overseas Development Institute (ODI). *Working paper*, 147
- Haile, Fiseha. And Miguel Nino-Zarazua. 2018. Does Social Spending Improve Welfare in Low-income and Middle-income Countries?. *Journal of International Development*. 30(3): 367-398
- Halim, Abdul., dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akutansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Halomoan Hutajulu, Agustina Sanggrangbano, Antonia K. Bonay. 2012. Kajian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 5(2): 87-100.

- Hukom, Alexandra. 2014. Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 7(2): 120-129
- Iqram, Pahrizal. 2013. *Reformasi Birokrasi di Nusantara*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Irhamni. 2018. Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1986-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. 7(1): 88-97
- Katy Cornwell dan Titik Anas. 2013. Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 49(1): 987-997.
- Kodrat, David Sukardi. 2006. Analisis Akumulasi Modal Manusia Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Tingkat Partisipasi Sekolah Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Timur). *E-journal STIESIA*, 11(3): 292-320.
- Kurniawan, Robi & Shunsuki Managi. 2012. Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 48(2): 657-678.
- Kusreni, Sri., dan Sultan Suhab. 2009. Kebijakan Apbd Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*. 5(3): 1-18
- Lucky Sondakh dan Gavin Jones. 2003. An Economic Survey Of Northern Sulawesi Turning Weakness Into Strengths Under Regional Autonomy. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*. 39(3): 273-302.
- Mahi, B. Raksaka, and Suahasil Nazara. 2012. Survey of recent developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 48(1): 7-31
- Menajang, Heidy. 2014. Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. 13(1):1-18—090p0
- Mohtar Rasyid. 2017. Konvergensi Pendapatan Provinsi Jawa Timur: Pendekatan Panel Kota/Kabupaten Periode 2000-2013. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10(2): 145-154.
- Moisiu, Alexander. 2014. Decentralization and the Increased autonomy in Local Governments. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 109 (2014): 459 – 463

- Muda, Iskandar and Azura Annisa Fitri Hutapea. 2018. Influence of capital expenditure and income original region to the income per capita in Indonesia. *Research to Implementation For Better Sustainability' IOP Publishing*.pp: 1-6
- Najiah, Laeni. (2013). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pdrb Di Kota Depok Periode 2001-2010*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2(2): 13-14.
- Ni Made Sukartini, Samsubar Saleh. 2016. Akses Air Bersih di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 9(2): 89-95.
- Nyoman Suartha, I Gst Wayan Murjana Yasa. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 10(2): 95-107.
- Olivia, Susan and Chikako Yamauchi. 2012. Survey of recent developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 48(2): 143-171
- Rimbawan, Nyoman Dayuh. 2010. Pertumbuhan Ekonomi Dan Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja Di Provinsi Bali. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. 6(2):1-12
- Silver, Christopher., Iwan J. Azis and Larry Schroeder. 2010. Intergovernmental Transfers And Decentralisation In Indonesia. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 37(3):345-362
- Srilianti Mamonto,Winda.2013. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Tenaga Kerja Pengaruhnya terhadap PDRB Kota Kotamobagu periode 2002-2011. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 1(4): 17-31.
- Suci, Stannia Cahaya., dan Alla Asmara. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. 3(1): 8-22
- Sumanto, Agus., dan Effendie. 2015. The Effect of Government Capital Expenditure and Private Investment on Social Welfare. *Journal of Economics and Sustainable Development*. 6(14): 202-216
- Susanti, Hera; Moh. Ikhsan dan Widyanti. 2000. Indikator-Indikator Makroekonomi 2nd ed. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Swandewi, Anak Agung Istri Agung. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran Dan

Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 3(7): 356-376.

Taras, Tyasani., dan Luh Gede Sri Artini. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. 6(5): 2360-2387

Yuli Andriansyah. 2009. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 50(2): 98-120.